



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	B-10
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

GELAR DISEMINASI PENGAWASAN KEUANGAN HAJI

# BPKH : Dana Haji Dikelola dengan Aman

PADANG - SINGGALANG

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan diseminasi pengawasan keuangan haji dengan stakeholder yang dilaksanakan di Mercure Hotel Padang, Selasa (12/10). Acara dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr. Muhammad Akhyar Adnan, Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Mhd Asli Chaidir, Walikota Padang, Hendri Septa, Ketua MUI Sumatera Barat (Sumbar), Buya Haji Gusrizal Gazahar, dan lainnya.

Menurut Dr. Muhammad Akhyar Adnan, BPKH telah berhasil melakukan beberapa pencapaian di era pandemi COVID-19. Pencapaian tersebut diantaranya mengenai dana kelolaan haji yang meningkat menjadi Rp155,1 Triliun.

"Tata kelola keuangan haji juga telah menerapkan teknologi digital, berupa aplikasi Ekhsan yang terintegrasi dengan siskohat di Kementerian Agama (Kemag)," katanya.

Ia mengatakan, dana haji dikelola dengan aman, likuid sehingga tidak perlu khawatir, karena tata kelola telah memenuhi berbagai standar, antara lain menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 37001:2016 Standar Mutu Anti Penyuapan.

"Tak hanya itu Laporan keuangan BPKH yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mendapatkan Opini WTP selama 3 tahun berturut-turut," tambahnya.

Pengelolaan dana haji juga terus meningkat pertumbuhannya tiap tahun, walaupun pandemi pendaftaran sempat tersendat, tetapi minat tetap tinggi, dan menariknya banyak milenial mulai banyak yang mulai mendaftar.

Meskipun akibat pandemi penyelenggaraan ibadah haji terpaksa ditunda, namun nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sepenuhnya dikembalikan kepada jemaah tunda, melalui pembagian virtual account



CENDERAMATA - Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr. Muhammad Akhyar Adnan, menerima cenderamata dari Walikota Padang, Hendri Septa. (hendri nova)

jemaah yang besaran rincian-nya dapat dilihat oleh masing-masing jemaah yang tertunda pada 2021 lalu.

Sementara Walikota Padang, Hendri Septa, berharap tahun depan sudah bisa berangkat haji. Saat ini jumlah jemaah haji Kota Padang yang tertunda 2020, sebanyak 1.350 jumlah calon jemaah haji.

"Ada sedikit penurunan, karena ada faktor pandemi di dunia. Pembatalan tahun ini memiliki dasar karena undang-undang dan keamanan akibat pandemi," katanya.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan evaluasi. Ia dapat memaklumi karena adanya pandemi. Atas dasar ini, ia mengajak umat Islam selalu berdoa, semoga pandemi covid 19 segera berakhir dan bisa melaksanakan ibadah haji dan rukun Islam ke-5.

"Pembatalan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga diseluruh dunia. Saat ini kami terus gencar melakukan vaksinasi, untuk memaksimalkan vaksinasi, sehingga jika saatnya tiba siap untuk melaksanakan ibadah haji," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut Akhyar Adnan juga menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Mereka menanyakan besaran biaya riil yang diper-

lukan dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana Jemaah yang berangkat sebagian dibayai oleh nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal.

Biaya riil yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji rata-rata sebelum pandemic, berkisar 70 juta rupiah/jemaah. Sedangkan yang dibankan kepada jemaah rata-rata Rp35,2 juta. Kebutuhan itu dipenuhi dari pengelolaan investasi yang dilakukan BPKH.

Selain untuk penyelenggaraan ibadah haji, sebagian lain dari nilai manfaat di alokasikan ke dalam virtual account jemaah tunggu. Harapannya porsi pembagian nilai manfaat akan lebih besar melalui virtual account, sehingga pada saat waktu melakukan pelunasan, maka tidak akan begitu besar karena adanya nilai manfaat / porsi bagi hasil yang diberikan BPKH kepada Calon Jemaah Haji.

BPKH adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPHH, serta untuk kemaslahatan umat Islam berdasarkan asas/prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nir laba, transparan, dan akuntabel.

Dengan penerapan teknologi informasi yang baik, BPKH dapat menjadi Lembaga kepercayaan umat yang mengelola keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Muhammad Asli Chaidir, mengungkapkan, daftar tunggu calon jemaah haji rata-rata nasional telah mencapai 24 tahun untuk haji reguler dan 6 tahun untuk haji khusus.

"Jumlah daftar tunggu haji reguler saat ini adalah sekitar 5 juta orang dan haji khusus sebanyak rata-rata 100 ribu orang," katanya.

Mayoritas calon jemaah haji yang menunggu dan yang berangkat pada tahun berjalan adalah calon jemaah berusia lanjut usia dan tergolong beresiko tinggi (risti).

Sementara Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, kembali mengulangi keberatannya adanya monopoli dalam pengelolaan setoran awal haji, karena itu sudah tidak sesuai syariah.

Ia berharap pemerintah lebih transparan, terhadap nilai manfaat yang bisa diterima jemaah haji, karena kalau didepositokan di bank syariah, hasilnya jauh lebih besar setelah 20 tahun masa tunggu, seperti masa tunggu terlama saat ini. (106)